

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja perempuan demi mendapatkan hak khusus pekerja perempuan yang harus diberikan karena perempuan memiliki fungsi reproduksi yang harus dijaga demi kesehatannya dan tidak mengganggu produktifitas kerja, Maka diadakannya hak khusus bagi pekerja perempuan. Namun demikian, masih saja terjadi permasalahan pelaksanaan yang harus diperbaiki. Hal ini disebabkan karena, kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan kepada para pekerja yang menerangkan tentang hak – hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai hak- hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja/buruh perempuan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan untuk mengetahui upaya hukum bagi Pekerja terkait pemenuhan haknya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yuridis normatif yakni merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dimana dalam menganalisis dan meneliti tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja khususnya perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan berdasarkan buku-buku tentang hukum dan peraturan-peraturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah..

Pelaksanaan perlindungan Hukum bagi pekerja perempuan terkait mengenai pemenuhan hak-hak khusus bagi perempuan yang dikarenakan mempunyai fungsi reproduksi yang harus di perhatikan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan terhadap pekerja perempuan mengenai pemberian hak-hak khusus pekerja perempuan, tindakan yang harus dilakukan pekerja yaitu melakukannya perundingan antara pihak pekerja dan pihak perusahaan agar mencapai kata sepakat mengenai penyelesaiannya, namun apabila penyelesaiannya tidak mencapai kata sepakat maka harus melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator bisa melalui mediasi, konsilliasi, dan arbitrase, dan apabila salah satu pihak menolak anjuran mediator dan konsiliator, langkah terakhir dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh pekerja yaitu meliputi langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membentuk serikat pekerja/serikat buruh, lembaga

ABSTRACT

In order to guarantee the protection of female workers in order to obtain special rights for women workers which must be given because women have reproductive functions that must be maintained for their health and do not interfere with work productivity, special rights are given for women workers. However, there are still implementation problems that need to be fixed. This is due to the lack of outreach from the company to the workers explaining the rights and obligations they are supposed to receive which results in a lack of knowledge of workers about the rights and obligations they should get. This study aims to determine the protection of women workers / laborers based on Law Number 13 of 2003 and to find out legal remedies for workers related to the fulfillment of their rights under Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

The preparation of this thesis uses the type of approach used in this research, which is carried out by means of juridical normative, juridical normative, namely library research, namely research on secondary data. Where in analyzing and researching the Implementation of Labor Law Protection, especially women based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower based on books on laws and legal regulations that have been set by the government.

The implementation of legal protection for women workers is related to the fulfillment of special rights for women who have reproductive functions that must be considered. There are still many violations committed by companies against women workers regarding the granting of special rights to women workers, actions that workers must take are negotiating between workers and company parties in order to reach an agreement on the settlement, but if the settlement does not reach an agreement then it must involve parties third, as a facilitator, it can go through mediation, conciliation and arbitration, and if one of the parties rejects the suggestion of the mediator and conciliator, the final step can be to file a lawsuit at the Industrial Relations Office. This is also in accordance with Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. the legal remedies that must be taken by workers include the following steps, namely forming a trade union/labor union, a bipartite cooperation institution, a tripartite cooperation institution, and finally through an industrial relations court